

**UPAYA TRANSFORMASI PETERNAK SAPI PERAH  
MELALUI KESEIMBANGAN DIMENSI  
SOSIO-KULTURAL DAN TEKNIS-EKONOMIS**

**ARTIKEL ILMIAH**

**Oleh :  
Lilis Nurlina  
NIP : 131.997.858**

**FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BANDUNG  
JULI 2007**

## **KATA PENGANTAR**

Perdagangan bebas mensyaratkan kemampuan masyarakat terhadap teknologi dan permodalan serta kemampuan dalam mengendalikan masa depan. Hal ini membutuhkan kerja sama berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan pelaksananya di lapangan serta masyarakat itu sendiri.

Peternak sapi perah sebagai bagian dari masyarakat pedesaan perlu ditransformasikan ke dalam sistem usaha sapi perah yang responsif terhadap pasar. Upaya ini perlu didukung subsistem hulu berupa ketersediaan pakan yang memadai dari aspek kuantitas maupun kualitasnya, serta subsistem hilir berupa pasar IPS dengan harga susu yang menggairahkan usaha peternak.

Koperasi Sapi Perah yang menaungi peternak yang dibantu dinas instansi terkait (Dinas Peternakan, Dinas UKMK dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian) perlu memperjuangkan nasib para peternak sapi perah baik melalui program pemberdayaan maupun fasilitator terhadap Industri Pengolahan Susu.

Hasil pemikiran aspek sosial ekonomi peternakan sapi perah ini tidak luput dari segala kekurangan dalam pembahasannya, namun demikian saya tetap berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, Juli 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>BAB</b>		<b>Halaman</b>
	<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
	<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Identifikasi Masalah .....	4
	1.3. Pendekatan Proses Transformasi .....	4
	1.4. Tujuan dan Manfaat .....	4
<b>II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>5</b>
	2.1. Peranan Koperasi/ KUD dalam Pembangunan Peternakan Sapi Perah	5
	2.2. Peranan Kelompok Peternak dalam Pembangunan Peternakan Sapi Perah .....	7
	2.3. Peternak sebagai subyek Pembangunan Peternakan Sapi Perah ..	8
	2.4. Faktor Pembatas Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Perah ..	13
<b>III</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	<b>14</b>
	3.1. Sistem Peternakan Sapi Perah Tradisional dan Modern Dilihat dari Teknis-Ekonomis dan Sosio-Kultural .....	14
	3.2. Sistem Transformasi Pembangunan Peternakan Sapi Perah Melalui Kelembagaan Koperasi .....	15
	3.3. Sistem Transformasi Pembangunan Peternakan Melalui Kelembagaan Kelompok .....	19
	3.4. Sistem Transformasi Melalui Upaya Peningkatan Partisipasi Peternak dan Proses Difusi Inovasi .....	23
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>26</b>
	4.1. Kesimpulan .....	26
	4.2. Saran .....	26
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>28</b>

# I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan iklim usaha yang sangat kompetitif, peternak perlu mempersiapkan diri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dari peternak itu sendiri. Sumber daya manusia khususnya masyarakat peternak menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan beternak sapi perah. Pengembangan sumber daya manusia akan tampak dari banyaknya manusia pembangunan yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan masa depan, yang mengandung implikasi : memiliki kemampuan (*capacity*), kebersamaan (*equity*), keberdayaan/kekuasaan (*empowerment*), ketahanan atau kemandirian (*sustainability*), dan kesalingtergantungan (*interdependency*) (Taliziduhu Ndraha, 1990).

Peternak sapi perah di pedesaan seharusnya memiliki mentalitas manusia pembangunan dalam peranannya sebagai manajer sekaligus pekerja, karena segala kegiatan produksi ternak bergantung kepada kualitas pribadi peternak berupa pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran membangun dalam jiwa peternak. Kesadaran membangun akan tumbuh bila peternak memiliki mentalitas manusia pembangunan yang menyangkut tata nilai, perilaku dan orientasi harapan sebagai fungsi motivasi berprestasi yang memberikan dorongan kuat pada diri peternak dalam pengembangan usaha ternak sapi perah. Tanpa adanya pendorong yang menjadi motor penggerak untuk bekerja secara produktif dan disiplin dalam mengelola ternak sapi perah, maka keberhasilan sulit tercapai.

Kesadaran untuk memiliki mentalitas manusia pembangunan juga harus dimiliki oleh pengurus dan manajer koperasi sebagai pimpinan yang menjalankan kebijakan usaha pengembangan sapi perah dan penyedia pelayanan kepada peternak anggota koperasi, sehingga ketiganya dapat bekerja secara sinergis sehingga usaha anggota dan koperasi dapat berkembang dengan baik.

Pembangunan peternakan (sebagai bagian dari pertanian) pada hakekatnya berusaha mentransformasikan sistem peternakan tradisional menjadi sistem peternakan modern yang maju (Mosher,1969; Schult &Mellor, 1976). Untuk

mentrans-formasikan sistem peternakan tersebut, maka setiap strategi pembangunan sekurang-kurangnya mencakup dua dimensi prima yaitu dimensi teknis-ekonomi dan dimensi sosio-kultural. Dimensi teknis-ekonomi menyangkut proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha para peternak, sementara dimensi sosio-kultural berintikan proses pentransformasian sikap mental, nilai-nilai, dan pola interpretasi peternak ke arah yang makin dinamis. Kedua dimensi tersebut saling terkait dan memiliki logika tersendiri sehubungan dengan elemen-elemen yang mendukungnya.

Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Weiltz (1971) terhadap proses transformasi pertanian di Eropa dan juga studi yang sama yang mengambil objek masyarakat agraris di India dan Asia Selatan (Mellor, 1976) seperti juga yang dilakukan oleh Hayami & Kikuchi (1981) dalam proses transformasi di Asia, khususnya di Asia Tenggara, mendapat kesimpulan yang senada bahwa perubahan-perubahan pada dimensi sosio-kultural masyarakat petani berlangsung lebih lambat dibanding perubahan dalam dimensi teknis-ekonomi masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan dimensi sosio-kultural masyarakat petani-peternak merupakan proses yang rumit dan mendasar. Kesalahan sedikit saja dalam penanganannya dapat membawa malapetaka yang amat besar bagi kelangsungan kehidupan petani-peternak. Berjangkitnya "penyakit" involusi bisa jadi merupakan salah satu contoh klasik tentang itu. Dengan kata lain, proses transformasi peternakan dapat diwujudkan bila terjadi perubahan dan perkembangan yang serasi antara dimensi teknis-ekonomi dan dimensi sosio-kultural masyarakat peternak. Proses inovasi teknologi baru akan terjadi bila dalam batas-batas tertentu telah timbul minat dan kesadaran dari sebagian atau seluruh anggota masyarakat terhadap manfaat suatu teknologi (Rogers & Shoemaker, 1987).

Oleh sebab itu strategi pembangunan peternakan yang berhasil selain diarahkan untuk memperluas cakupan penyempurnaan teknologi intensifikasi, juga yang memberi perhatian sama besar terhadap usaha untuk mengembangkan kemampuan, sikap mental, dan responsitas petani-peternak, sehingga semakin banyak pula petani-peternak yang dapat dilibatkan dan menjalani proses perubahan.

Dapat dikonsepsikan bahwa tingkat kesesuaian pola pembinaan dan pendekatan kepada peternak secara kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar

kemampuan pola pembinaan dan pendekatan itu untuk memotivasi dan merangsang peternak secara lebih aktif meningkatkan partisipasinya. Secara kualitas ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam menyerap unsur-unsur normatif dan substansi dari suatu program (termasuk intensifikasi peternakan sapi perah yang dikenal dengan Sapta Usaha Ternak Sapi Perah yang dilaksanakan peternak sapi perah anggota koperasi).

Pentingnya peranan koperasi/ KUD Sapi Perah dalam pengembangan peternakan sapi perah yaitu dalam mengatasi kesulitan modal untuk pengadaan bibit dan sarana produksi peternakan yang dilakukan melalui sistem kredit serta upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta motivasi berusaha melalui kegiatan penyuluhan. Kenyataan di lapangan (koperasi sapi perah di wilayah Kabupaten Bandung seperti KPBS, KUD Sarwa Mukti, KUD Sinar Jaya; di wilayah Kabupaten Garut seperti KPGS, KUD Cisarupan dan KUD Bayongbong, dan di Kabupaten Sumedang KSU Tandang Sari) menunjukkan bahwa manajemen koperasi, dinamika kelompok peternak dan partisipasi peternak dalam kegiatan untuk memajukan usaha ternak sapi perah belum mencapai tahap usaha yang "optimal dan efisien". Hal ini disebabkan karena kualitas sumber daya peternak yang kurang memadai. Skala pemilikan di tingkat peternak masih rendah (kebanyakan 2-4 ekor) yang hal ini dibatasi oleh pemilikan lahan untuk hijauan yang sempit serta tingkat produksi susu yang rata-rata 10 liter per ekor per hari. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan peternak sehingga sulit untuk mencapai kesejahteraan anggota sebagaimana yang dicita-citakan oleh suatu organisasi koperasi.

Menurut Dasuki (1983) masalah peternakan sapi perah di Jawa Barat, secara situasional dan kondisional, dapat digambarkan sebagai suatu proses yang kompleks dengan lingkungan internal ekosistem pertanian. Dalam kompleksitas tersebut, luas lahan usaha tani merupakan kendala utama, sedang sapi perah, hijauan pakan, teknologi, dan pengelolaan ekosistem sebagai implikasi variabel yang harus dimanipulasi secara selaras, serasi, dan seimbang. Selain itu terdapat variabel eksternal berupa kebijakan pemerintah dan organisasi institusional yang menjamin insentif produksi belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan pemerintah.

Permasalahan di atas merupakan gap antara kondisi sistem peternakan tradisional dengan sistem peternakan modern, sehingga perlu dicari upaya transformasi pembangunan peternakan sapi perah ini yang melibatkan semua “stakeholder” sehingga diperoleh suatu model pengembangan usaha ternak sapi perah yang dapat mengatasi kesulitan di tingkat peternak, kelompok, dan koperasi.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana sistem peternakan tradisional dan sistem peternakan modern
2. Bagaimana proses transformasi pembangunan peternakan sapi perah melalui kelembagaan koperasi dan kelompok
3. Bagaimana proses transformasi pembangunan peternakan sapi perah melalui peningkatan kualitas sumber daya peternak dengan melibatkan beberapa komponen sistem sosial dalam proses penyebaran inovasi.

### **1.3. Pendekatan Proses Transformasi**

Pendekatan proses transformasi dilakukan melalui kegiatan pendidikan bagi pengurus, manajer dan karyawan koperasi serta kegiatan penyuluhan bagi ketua kelompok dan peternak sebagai anggota koperasi. Untuk pengembangan koperasi diarahkan pada upaya “efisiensi usaha” dan untuk kelompok diarahkan pada upaya keefektifan kelompok atau “dinamika kelompok”, bagi ketua kelompok diarahkan pada kemampuan memimpin anggota dan bagi anggota diarahkan pada terciptanya partisipasi yang tinggi baik sebagai anggota kelompok maupun sebagai anggota koperasi.

### **1.4. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengkaji bagaimana kelembagaan tradisional di pedesaan berhubungan dengan lembaga modern di pedesaan atau di perkotaan serta bagaimana perubahan sikap dan norma peternak dari yang berdasarkan rasa menjadi berdasarkan rasio (rasional).
2. Manfaat dari penulisan artikel ilmiah ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran tentang proses transformasi pembangunan peternakan sapi perah

## II TINJAUAN PUSTAKA

### **2.1. Peranan Koperasi/ KUD Dalam Pembangunan Peternakan Sapi Perah**

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan, dengan batasan sendi-sendi dasar koperasi Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup para anggota dan masyarakat di wilayah kerjanya melalui pelayanan yang memenuhi kebutuhan mereka.

Pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang No 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa : “koperasi melaksanakan prinsipnya sebagai berikut : (a) keanggotaan bersifat sukarela; (b) pengelolaan dilakukan secara demokratis; (c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; (d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan (e) kemandirian.

Uraian diatas menunjukkan bahwa organisasi koperasi mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Ciri pembeda tersebut ditunjukkan oleh peran anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pelanggan dari kegiatan usaha koperasi. Sedangkan tujuan koperasi yang ingin dicapai adalah promosi (pelayanan) bagi kepentingan anggota melalui bekerjanya perusahaan koperasi.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan peternakan sapi perah ditunjukkan oleh adanya pemberian kredit sapi perah kepada peternak anggota koperasi dalam rangka lebih menjangkau masyarakat berpenghasilan kecil (Salman, 1990). Tumbuhnya bermacam-macam jenis kredit seperti PUSP, Banpres, Sistem Sumba Kontrak, dan Pola KUD Model, merupakan upaya pembangunan peternakan di bidang sapi perah serta dalam rangka membantu masyarakat golongan ekonomi lemah di pedesaan, dengan persyaratan sudah memiliki beberapa ekor sapi perah atau sekurang-kurangnya berpengalaman memelihara sapi perah sekalipun bukan milik sendiri (khusus program KUD Model).

Pada umumnya ketentuan pemberian kredit ini hampir sama antara lain : jangka waktu kredit tujuh tahun dengan suku bunga sekitar 10,5 % setahun. Perbedaan terletak pada pemberian jumlah paket dan pengembalian kreditnya



(Dasuki, 1983). Cara pengembalian kredit PUSP, peternak langsung membayar ke Bank, sementara pola KUD Model dan Banpres melalui koperasi dengan membayar sejumlah 3 liter susu per ekor per hari bila sapi sudah berproduksi. Sapi perah ini diimpor dari Belanda dan New Zealand dengan jenis sapi Fries Holland (FH) yang memiliki tingkat produksi susu yang tinggi pada kondisi iklim dingin dan manajemen yang baik.

Dengan kegiatan kawin suntik (inseminasi buatan/ IB) dari semen pejantan unggul terhadap betina impor dan keturunannya, maka jumlah bibit sapi cepat bertambah, dan pada gilirannya akan mempercepat pula peningkatan jumlah produksi susu (Dasuki, 1983). Selain itu struktur populasi sapi perah diatur lebih seimbang terutama melalui program yang mengadopsi inseminasi buatan. Keseimbangan komponen struktur populasi dalam peternakan sapi perah rakyat yang tergabung dalam koperasi yang tersebar luas dengan pemilikan kecil, lebih sukar tercapai daripada dalam perusahaan sapi perah. Kendala lainnya adalah masalah penggalakan fungsionalisasi sapi perah sesuai dengan potensi genetiknya yaitu mengutamakan tujuan produksi susu.

Koperasi berperan dalam ikut serta membangun peternakan sapi perah, apabila pelayanan yang diberikan koperasi dalam hal penyediaan sarana produksi peternakan bersifat optimal seperti bibit dan semen yang unggul, konsentrat berkualitas, tenaga inseminator yang terampil, tenaga kesehatan hewan yang memadai, tenaga kolektor susu di Komda terampil dan jujur, membantu peternak dalam penyediaan hijauan atau kendaraan untuk mencari hijauan ke luar wilayah pada saat kekuarangan hijauan (musim kemarau), serta yang paling penting adalah harga yang diberikan koperasi memberikan keuntungan bagi peternak, disamping menguntungkan bagi koperasinya.

Menurut Noer Soetrisno (2002) Koperasi di sub sektor peternakan terutama sapi perah, apapun kebijakan yang ditempuh akan mampu berkembang dengan karakter koperasi yang kental. Prasyarat untuk memajukan koperasi di bidang persusuan ini dalam menghadapi persaingan global antara lain : (1) bebaskan anggota yang ada hingga usahanya minimal skala mikro atau minimal 10 ekor/anggota; (2) bebaskan setiap koperasi hingga mencapai satuan yang layak sebagai kluster peternakan minimal 15.000 liter/hari dan idealnya 100.000 liter/ hari;

(3) integrasi untuk konsep pertanian dan peternakan agar menjamin kesatuan unit untuk meningkatkan kepadatan investasi pertanian. Kebijakan ini membutuhkan penyediaan hijauan yang cukup yang berarti atau perlu penyediaan lahan untuk rumput/ hijauan serta pemanfaatan limbah pertanian secara optimal.

## **2.2. Peranan Kelompok Peternak dalam Pembangunan Peternakan Sapi Perah**

Mosher (1967) mengemukakan bahwa salah satu syarat pelancar pembangun-an pertanian adalah adanya kegiatan kerja sama Kelompok Tani. Kelompok dapat diartikan sebagai himpunan yang terdiri dari dua atau lebih individu dengan ciri-ciri memiliki : (a) ikatan yang nyata; (b) interaksi dan interelasi sesama anggotanya ; (c) struktur dan pembagian tugas yang jelas; (d) kaidah-kaidah atau norma tertentu yang disepakati bersama; dan (d) keinginan dan tujuan yang sama.

Bagi peternak, kelompok merupakan jaringan komunikasi yang mampu menggerakkan mereka untuk melakukan adopsi teknologi baru. Melalui wadah ini petani-peternak dibimbing dan diarahkan untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan perekonomian dinamis (Herman Soewardi, 1972).

Beberapa keuntungan dari pembentukan kelompok tani menurut Torres (1977) dalam Tatok Mardikanto (1993) adalah : (a) semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan semakin terbinanya kepemimpinan kelompok; (b) semakin terarahnya peningkat-an secara cepat tentang jiwa kerja sama antar petani; (c) semakin cepatnya proses perembesan (difusi) penerapan inovasi; (d) semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian hutang (pinjaman petani); (e) semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang berkaitan dengan masukan (input) maupun produk yang dihasilkan; dan (f) semakin dapat membantu efisiensi pembagian air irigasi serta pengawasannya oleh petani sendiri.

Di lain pihak, Sajogyo (1978) memberikan tiga alasan utama dibentuknya kelompok tani yang mencakup : (a) untuk memanfaatkan secara lebih baik (optimal) semua sumber daya yang tersedia; (b) dikembangkan oleh pemerintah sebagai alat pembangunan; dan (c) adanya alasan ideologis yang “mewajibkan “ para petani untuk terikat oleh suatu amanat suci yang harus mereka amalkan melalui kelompok taninya. Di dalam kelompok, petani-peternak dapat memperoleh informasi terutama

informasi teknologi. Hal ini sesuai pendapat Dudung Abdul Adjid (dalam Satpel Bimas, 1980), bahwa di dalam kelompok tani terdapat proses transformasi, yaitu mengolah informasi baru dari PPL menjadi informasi praktis, spesifik, sesuai kondisi masyarakat setempat. Selanjutnya dinyatakan bahwa PPL sebagai penyuluh merupakan “titik bola” proses adopsi inovasi, mengolah dan menyampaikan informasi teknologi baru melalui pengembangan dan pembinaan kegiatan kelompok tani.

Hadisapoetro (1978) menawarkan pengintegrasian antara kelompok tani dengan KUD setempat, sementara Herman Soewardi (1980) menawarkan agar kelompok tani dapat dikaitkan dalam program perkreditan. Dalam kelompok, peternak tergabung dalam sebuah koperasi sapi perah yang memperoleh bantuan bibit sapi dan pelayanan lainnya melalui fasilitas kredit serta pemasaran hasil (produksi susu) oleh koperasi.

### **2.3. Peternak sebagai Subyek Pembangunan Peternakan Sapi Perah**

Petani-peternak sebagai perorangan, memiliki perbedaan satu sama lain, dalam hal caranya mengadopsi teknologi baru atau metode-metode baru. Mosher (1986) menggolongkan dua kategori petani. **Pertama**, kelompok petani yang masih mempertahankan metode-metode yang telah dipraktekkan orang tuanya, dan kadang-kadang meniru sesuatu yang baru dari tetangganya. Dalam sosiologi Barat disebut “*peasant*” (*subsistence farmers*) (Loekman Soetrisno, 2002). **Kedua**, kelompok petani yang secara aktif mencari metode-metode baru, sehingga pengetahuan mereka banyak bertambah dari tahun ke tahun, dan mereka menmgharapkan masa depan yang jauh lebih baik, yang menurut Loekman Soetrisno (2002) disebut “*farmers*”

Menurut Rogers dan Shoemaker (1987) karakter petani sesuai dengan kategori adopter di suatu daerah terdiri dari : (a) innovator, pada umumnya berjumlah 2,5 %; (b) early adopter (pelopor) sekitar 13,5 %; (c) early majority (pengikut dini) sekitar 34%; ( d) late majority (pengikut akhir) sekitar 34 %; dan (e) laggard (golongan penolak) sekitar 16 %.

Berkaitan dengan gambaran di atas, persepsi peternak terhadap suatu inovasi bergantung pada tingkat pengetahuan (kognisi) yang dimilikinya, sedangkan persepsi itu sendiri akan mempengaruhi sikap individu terhadap penerimaan atau penolakan

terhadap inovasi. Persepsi yang diberikan oleh setiap individu akan berbeda terhadap stimulus yang diberikan, karena setiap individu memiliki karakter yang berbeda (Nord, 1976). Selanjutnya menurut Atmadilaga (1974) karakteristik peternak dapat dilihat dari umur, tingkat pendidikan, jumlah pemilikan ternak, pengalaman beternak, hubungan dengan individu lain, dan hubungan dengan lembaga terkait.

Umur berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam menerima sesuatu yang baru. Usia muda adalah saat dimana hidup penuh dinamis, kritis dan selalu ingin tahu hal-hal baru. Wiriatmadja (1973) dalam hal ini menyatakan bahwa golongan pelopor umumnya kira-kira berumur setengah baya (40 tahun), namun memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang baik, golongan pengetrap dini berumur 25-40 tahun, golongan pengetrap awal berumur 41-45 tahun, pengetrap akhir berumur 46-50 tahun, dan golongan penolak lebih dari 50 tahun.

Pendidikan seseorang mempengaruhi persepsi orang terhadap inovasi. Seseorang yang berpendidikan tinggi relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi inovasi, begitu pula sebaliknya seseorang yang berpendidikan rendah, maka agak sulit untuk melaksanakan adopsi inovasi dengan cepat (Soekartawi, 1988). Hal ini sesuai dengan pendapat Inkeles (1984), bahwa hampir semua penelitian yang menyangkut modernisasi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor utama. Artinya, tingkat kemodernan seseorang akan meningkat dengan bertambahnya pendidikan.

Jumlah pemilikan ternak mempengaruhi persepsi seseorang terhadap inovasi. Peternak yang mempunyai jumlah ternak relatif banyak dan pendapatan relatif tinggi, relatif berpandangan maju dan mempunyai wawasan luas. Artinya, mereka tidak terlalu skeptis terhadap perubahan baru yang berada di sekitarnya, dan bahkan biasanya selalu berpandangan positif terhadap adanya perubahan (Soekartawi, 1988).

Pengalaman beternak juga mempengaruhi persepsi mereka terhadap inovasi. Peternak yang berpengalaman akan lebih mudah diberi pengertian, artinya lebih cepat dalam menerima introduksi baru yang yang diberikan (Margono dan Asngari, 1969). Hubungan dengan individu lain, dan lembaga terkait, akan memberikan persepsi yang lebih baik terhadap inovasi, karena berkunjung atau berkonsultasi dengan sesama peternak, penyuluh, atau lembaga terkait akan

menambah wawasan dan tingkat pengetahuannya. Wawasan dan tingkat pengetahuan yang diperoleh peternak menjadi pendorong baginya untuk mempersepsikan inovasi dengan lebih baik (Soekartawi, 1988).

Berdasarkan ciri-ciri sosial ekonomi, karakteristik pengadopsi cepat ditandai oleh tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Pengadopsi cepat mempunyai tingkat mobilitas sosial yang besar. Kekayaan dan keinovatifan muncul berjalan seiring, karena keuntungan yang besar diperoleh orang yang mempersepsikan inovasi dengan sangat baik dan mengadopsi pertama (golongan innovator).

Karakteristik peternak berdasarkan personalitas menunjukkan bahwa pengadopsi cepat mempunyai empati yang lebih besar. Empati ialah kemampuan seseorang untuk memproyeksikan dirinya ke dalam peranan orang lain. Pengadopsi cepat mempunyai rasionalitas lebih besar. Rasionalitas sangat efektif digunakan untuk menjangkau suatu tujuan. Sikap berkenan terhadap perubahan, sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan akan mempengaruhi persepsi dan pengadopsian seseorang.

Persepsi merupakan "*covert response*" (respon tertutup) sementara partisipasi merupakan "*overt response*" (respon terbuka) terhadap suatu inovasi. Partisipasi peternak dalam penerimaan inovasi ditunjukkan oleh adanya kemampuan peternak baik secara fisik berupa keterampilan melaksanakan "Sapta Usaha Ternak Sapi Perah" serta secara mental memiliki motivasi prestasi perilaku wirausaha. Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi dan perilaku wirausaha akan mempunyai tujuan yang realistis, mau mengambil resiko serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan (beternak). Dengan demikian ia akan mencoba hal-hal baru agar produksi dan kualitas susunya tinggi, sesuai dengan standar kualitas susu yang ditentukan oleh Industri Pengolah Susu (IPS). Pemeriksaan kualitas susu pada tingkat kelompok bukan pada tingkat individu peternak, memerlukan adanya kerja sama dalam mencapai kualitas susu standar melalui keseragaman tingkat adopsi inovasi usaha ternak sapi perah. Hal ini membutuhkan partisipasi dan tanggung jawab dari semua anggota.

Menurut Sedanaya (1989), suatu partisipasi akan terjadi dalam kelompok, apabila individu di dalamnya membuka diri dari saling pengertian, saling memberi

usul, komentar, serta ikut bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan. Sebaliknya partisipasi tidak akan terjadi kalau individu dalam kelompok menutup diri dan tidak peduli terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok.

Menurut Davis yang dikutip Sastropoetro (1988), bahwa partisipasi mengharapkan keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam suatu kelompok yang dengan keterlibatannya ini banyak mendorong seseorang dalam kelompok tersebut untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan partisipasi di masyarakat tidak cukup hanya melibatkan mental atau emosi saja, tetapi diperlukan aktivitas fisik (Sedanaya, 1989). Selanjutnya dikatakan bahwa partisipasi tergantung dari pemahaman seseorang terhadap makna suatu kegiatan. Makin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap suatu kegiatan, makin tinggi pula partisipasinya dalam kegiatan tersebut. Makin rendah pemahaman seseorang terhadap suatu kegiatan maka makin rendah pula tingkat partisipasinya dalam kegiatan kelompok.

Partisipasi peternak sapi perah dalam setiap kegiatan baik di tingkat kelompok maupun koperasi perlu muncul mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi kegiatan. Namun demikian ada pembagian kewenangan, misalnya dalam menentukan kebutuhan/ yang diinginkan peternak untuk meningkatkan produksi susu dan situasi yang dihadapi peternak, wakil peternak yang paling mengetahui, sementara cara-cara untuk memenuhi kebutuhan (cara-cara meningkatkan produksi susu) penyuluhlah yang lebih mengetahui. Dengan demikian suatu perencanaan kegiatan penyuluhan atau kegiatan lain di kelompok, partisipasi peternak disesuaikan dengan kemampuan dan kepentingannya. Dalam pelaksanaan, peternak lebih banyak terlibat, sementara dalam evaluasi peternak memberikan data-data mengenai sejauhmana kegiatan telah tercapai dan hasil yang dicapai peternak sebagai bahan kajian bagi penyuluh untuk menganalisis faktor pendukung, kendala serta rekomendasi untuk kegiatan penyuluhan selanjutnya.

Ada beberapa alasan mengapa peternak perlu berpartisipasi, menurut Van den Ban dan Hawkins (1999), alasan tersebut adalah :

1. Mereka memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang berhasil, termasuk tujuan, situasi, pengetahuan serta pengalaman mereka dengan teknologi dan penyuluhan serta struktur sosial masyarakat.

2. Mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja sama dalam program yang diadakan jika ikut bertanggungjawab di dalamnya.
3. Masyarakat demokratis secara umum menerima bahwa rakyat yang terlibat berhak berpartisipasi dalam keputusan mengenai tujuan yang ingin mereka capai.
4. Banyak permasalahan pembangunan pertanian tidak mungkin lagi dipecahkan dengan pengambilan keputusan perorangan. Partisipasi kelompok sasaran dalam keputusan kolektif sangat dibutuhkan.

Kesediaan masyarakat (masyarakat peternak sapi perah) untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal peternak tersebut untuk berkembang secara mandiri. Secara khusus, berdasarkan penelitian dan pengalamannya di Afrika, Uma Lele dalam Taliziduhu Ndraha (1990) menyatakan bahwa partisipasi (vertical) masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dapat membangkitkan rasa percaya pada kemampuan sendiri masyarakat. Rasa ini mendorong tumbuhnya prakarsa dan kegiatan bersama, dan demikian dengan partisipasi horisantalpun, dapat tergerak.

Partisipasi anggota yang ideal dirumuskan sebagai keikutsertaan para anggota secara menyeluruh dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, arah dan langkah usaha dalam pemanfaatan usaha dan dalam menikmati Sisa Hasil Usaha dari koperasi (Herman Soewardi, 1985). Dalam segi teknis, partisipasi peternak nampak dari dilaksanakannya teknologi "Septa Usaha Ternak" atau "*feeding*", "*breeding*", dan "*management*", sementara dari dimensi sosio-kultural nampak dari adanya perubahan sikap dan pandangan dari yang mengikuti norma tradisional ke norma modern.

Partisipasi ini dapat tumbuh dan efektif, apabila manajemen koperasi didorong untuk merekayasa organisasi sedemikian rupa sehingga terdapat keselarasan atau kesesuaian (*fit*) antara tugas program yang telah disusun (berkaitan dengan program pengembangan peternakan sapi perah yakni peningkatan populasi ternak sapi perah dan produksi susu) dengan kemampuan pengurus dan manajer untuk melaksanakannya dimana keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan atau aspirasi peternak sebagai anggota koperasi, sehingga hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anggota.

Dengan demikian sudah seharusnya pengurus, manajer dan ketua kelompok serta penyuluh berkewajiban untuk menggerakkan partisipasi peternak anggotanya dalam setiap kegiatan yang diadakan dan bertujuan untuk mamajukan usaha anggota sekaligus usaha koperasi. Mereka sudah dibekali pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta kewirausahaan yang diharapkan dapat diaplikasikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya di dalam organisasi atau kelompok yang dipimpinnya.

#### **2.4. Faktor Pembatas Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Perah**

##### **1. Luas Lahan yang Memadai;**

Usaha ternak sapi perah membutuhkan luas lahan memadai untuk menyediakan rumput sebagai pakan utamanya. Satu ekor sapi membutuhkan 700 meter persegi lahan untuk memenuhi kebutuhan hijauannya secara kontinuitas, sehingga bila ada 4000 ekor (populasi sapi di suatu koperasi) berarti membutuhkan 2,8 juta meter persegi atau 400 hektar lahan. Hal ini sulit untuk disediakan, mengingat lahan utama petani biasanya untuk tanaman pangan.

##### **2. Permodalan.**

Usaha ini memerlukan investasi modal yang cukup besar. Baik peternak maupun koperasi biasanya mengalami kesulitan modal. Salah satu alternatifnya adalah dengan melakukan pinjaman ke Bank atau bermitra dengan pemilik modal melalui sistem kredit, atau sistem bagi hasil.

##### **3. Kekurangan dalam Keterampilan/ Skill Beternak**

Untuk mencapai sistem peternakan yang modern dibutuhkan keterampilan di bidang teknis dan manajemen usaha. Sebagian peternak belum sepenuhnya melaksanakan teknologi sapta usaha ternak yang direkomendasikan penyuluh serta belum melakukan manajemen usaha ke arah komersialisasi dan efisiensi usaha. Hal ini ditunjukkan oleh tidak adanya pencatatan produksi, reproduksi dan analisa usaha, yang sebenarnya diperlukan untuk mengevaluasi dan merencanakan pengembangan usaha di bidang ini.



### III PEMBAHASAN

#### 3.1. Sistem Peternakan Sapi Perah Tradisional dan Modern Dilihat dari Teknis-Ekonomis dan Sosio-Kultural

Sistem peternakan sapi perah yang tradisional secara teknis ditandai oleh : skala usaha kecil ( kepemilikan ternak kurang dari 4 ekor), luas lahan sempit, dan sistem pemeliharaan yang tradisional (belum menerapkan teknologi konvensional sapa usaha ternak dengan baik) dan tingkat produksi susu yang rendah. Dari aspek ekonomi, ia belum berorientasi pada pasar (melakukan analisa usaha) serta dari aspek sosio-kultural kurang inovatif, berwawasan sempit, mudah menyerah dan sebagainya. Sementara sistem peternakan yang modern sudah menerapkan aspek “feeding” (pemberian pakan), “breeding” (seleksi dan perkawinan) dan “management” sehingga tingkat produksi susu bisa lebih tinggi dan lebih menuntungkan. Berdasarkan ketersediaan lahan, seorang peternak yang rasional sudah memperhitungkan berapa jumlah ternak yang dimiliki, tentunya yang dapat mencapai tingkat efisiensi usaha tertentu.

Peternak modern juga memiliki sikap dan motivasi berprestasi perilaku wirausaha seperti yang dikemukakan oleh Mc Clelland (1987) dan Munandar (1992), dimana peternak mengidentifikasikan diri dengan misi, tujuan pekerjaan, dan tekad-tekad sebagai berikut :

1. Mempunyai tujuan realistis dan mau mengambil resiko serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan (beternak)
  - a. Produksi susu sebagai pendapatan utama beternak sapi perah
  - b. Persiapan menghadapi musim kemarau
  - c. Usaha mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas susu
2. Mempunyai semangat dan tekad untuk konsentrasi dan penuh perhatian terhadap pekerjaan (beternak)
  - a. Kesiapan melaksanakan pemerahan
  - b. Disiplin dalam pekerjaan
  - c. Ketabahan dalam menjalankan usaha
3. Mempunyai semangat menyusun rencana-rencana (beternak) yang relevan dan

- “feasible” dengan rencana yang hendak dipakai
- a. Berorientasi usaha ternak sapi perah sekarang dan masa depan
  - b. Keinginan untuk menggali factor-faktor produksi (peternakan sapi perah)
  - c. Keterampilan dalam pengambilan keputusan (beternak)
4. Mempunyai tekad untuk membuat dirinya terlibat serta terikat dalam beternak
    - a. Pencurahan waktu untuk pemeliharaan ternak sapi perah
    - b. Kebanggaan terhadap profesi sebagai peternak sapi perah
    - c. Ketekunan melaksanakan rutinitas pemerahan pada ternak laktasi
  5. Mempunyai tekad untuk berkorban sebagai investasi demi hasil yang baik
    - a. Penyediaan lahan untuk rumput unggul
    - b. Penyediaan pakan konsentrat
    - c. Penyediaan ternak pengganti
  6. Mempunyai pengetahuan serta watak inovatif dalam usaha (beternak)
    - a. Keterampilan berpikir kreatif
    - b. Mencari informasi tentang beternak sapi perah
    - c. Mencoba hal-hal baru dalam beternak sapi perah

### **3.2. Sistem Transformasi Pembangunan Peternakan Sapi Perah Melalui Kelembagaan Koperasi**

Menurut para pemikir ekonomi kerakyatan, perkembangan koperasi tidak secepat seperti yang terjadi pada bentuk perusahaan (perusahaan peternakan sapi perah), karena pembentukan koperasi (koperasi sapi perah) adalah penghimpunan manusia (peternak) yang memerlukan suatu proses pendidikan untuk menyatukan visi dan misi sebagai anggota koperasi.

Keterpurukan koperasi berdasarkan pengamatan, bukan karena kesalahan kaidah-kaidah koperasi, akan tetapi sepenuhnya telah dibuktikan karena penyimpangan-penyimpangan dari kaidah koperasi itu sendiri. Penyimpangan-penyimpangan yang bersifat fundamental seperti ; pendirian koperasi berdasarkan kebutuhan anggota yang tidak jelas, tidak memiliki kriteria keanggotaan yang jelas, pendirian unit usaha yang tidak memenuhi kelayakan usaha serta hak-hak anggota yang terbelenggu, perlu segera dikoreksi (Yuyun Wirasasmita, 2004). Dalam menghadapi era liberalisasi dan globalisasi sudah saatnya koperasi (termasuk koperasi persusuan ) melakukan reformasi : (1) Mendorong koperasi tunggal usaha

(Single Purpose Cooperative) dengan inti usaha (Core business) yang layak ; (2) Menendorong merger/amalgamasi bagi koperasi-koperasi kecil; (3) Menentukan criteria keanggotaan sebagai pemilik dan pelanggan dan hubungan kontraktual antara anggota dengan koperasi; (4) Menerapkan asas proporsionalitas dalam pendanaan dari anggota; (5) Menerapkan pendidikan anggota, pengurus, pengelola koperasi yang berkelanjutan; (6) Mendorong kemitraan/aliansi strategic / jaringan usaha; (7) Memanfaatkan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perkoperasian; dan (8) Menerapkan kaidah-kaidah penghematan dalam koperasi.

Mendorong koperasi menjadi koperasi usaha tunggal merupakan upaya untuk menuju efisiensi biaya rendah. Koperasi tunggal usaha pada umumnya lebih efisien karena memusatkan kepada usaha tertentu (sapi perah) sehingga akan mendapatkan pengalaman yang berharga dan dapat mencapai efisiensi yang tinggi. Kenyataan menunjukkan bahwa koperasi peternakan yang usaha tunggal seperti KPBS dan KPSBU di Kabupaten Bandung merupakan koperasi yang relatif maju dibanding KUD Persusuan (KUD Sarwa Mukti dan KUD Sinar Jaya). Namun demikian tidak hanya factor single atau multi usaha, factor tingkat pendidikan pengurus juga akan berpengaruh terhadap pola manajemen dan keberhasilan koperasi.

Dengan koperasi memiliki "Core Business" (sapi perah) yang kuat dan layak, maka koperasi tersebut akan terhindar dari persaingan yang keras. Kebijakan merger/ amalgamasi adalah untuk mencapai skala ekonomis sehingga tercapai ukuran minimum yang efisien. Hal ini agak sulit untuk dilakukan karena menyangkut pola kerja yang berbeda dengan wilayah kerja yang berbeda, mengingat koperasi di pedesaan pengurusnya kebanyakan masih bersifat tradisional. Kebijakan hal ini perlu ketegasan dan bantuan pemerintah.

Kebijakan penentuan criteria atau persyaratan keanggotaan adalah untuk meningkatkan partisipasi anggota baik sebagai pemilik maupun pelanggan. Kemampuan melangani dan mendanai dengan suatu jumlah tertentu, misalnya dapat dijadikan salah satu persyaratan untuk menjadi anggota. Dengan criteria keanggotaan yang jelas akan lebih memudahkan operasi koperasi baik di bidang pengadaan, pemasaran, maupun keuangan. Penetapan criteria keanggotaan akan membawa dampak kepada rendahnya biaya organisasi dan produksi.

Hubungan kontraktual antara anggota dan koperasi dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian atau biaya transaksi. Sementara kebijakan pendanaan dari anggota yang berdasarkan azas proporsionalitas akan mendorong para calon anggota koperasi yang kaya akan bergabung ke dalam koperasi. Hal ini dapat mengurangi masalah kebutuhan modal dan sekaligus menciptakan keadilan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), bagi koperasi menjadi salah satu prinsip yang berarti harus selalu dilakukan secara berkesinambungan. Pendidikan/ Pelatihan diartikan secara luas dan spesifik. Dalam arti luas memahami mekanisme koperasi yaitu bagaimana koperasi dapat menghasilkan manfaat bagi anggota, apa yang harus dikerjakan anggota, pengurus, pengelola dan karyawan. Dalam arti spesifik ialah pendidikan/pelatihan dalam bidang tertentu yang relevan atau potensial untuk meningkatkan efisiensi usaha atau untuk mengatasi masalah-masalah tertentu (untuk anggota dengan penyuluhan “Sapta Usaha Ternak” dan Perkoperasian, untuk pengurus dan pengelola dengan pendidikan/ pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan serta bila memungkinkan dapat mengikuti pendidikan formal (kelas jauh) di IKOPIN atau Perguruan Tinggi lainnya.

Kebijakan untuk melakukan kemitraan /aliansi “strategic networking”, mempunyai dua jenis dampak yang positif. Pertama, menciptakan “*external scale of economies*”. Kedua, mengurangi ketidakpastian. Kedua dampak positif tersebut berpengaruh langsung kepada penurunan biaya.

Kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah penghematan merupakan landasan yang paling pokok dari koperasi. Kesadaran akan penghematan atau efisiensi telah menjadi tradisi dalam sejarah pembangunan koperasi. Kebijakan ini menyangkut penghematan dalam penggunaan input, administrasi, struktur organisasi yang akan mempunyai dampak yang positif terhadap operasionalisasi koperasi dan lingkungan.

Kebijakan-kebijakan yang memungkinkan koperasi dapat menciptakan keunikan /diferensiasi adalah : (1) kebijakan promosi anggota, (2) Identifikasi *felt needs* anggota, (3) uji pasar, (4) Uji partisipasi/ manfaat untuk anggota; dan (5) Optimalisasi pelayanan anggota.

Kebijakan promosi anggota : Hubungan antara koperasi dengan anggota, tidak berdasarkan hubungan pasar, akan tetapi lebih berdasarkan hubungan kooperasi,

sehingga barang/ jasa yang dihasilkan anggota didesain untuk pemanfaatan bukan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Harga barang maupun jasa (sapronek) untuk anggota diusahakan dapat menutup biaya yang telah diusahakan secara efisien atau biaya standar. Selain itu, selalu mengidentifikasi kepentingan anggota, sehingga barang-barang dan jasa (sapronek, pelayanan IB, kesehatan ternak, uji kualitas air susu, penyediaan kebutuhan sehari-hari peternak) selalu sesuai dengan kebutuhan anggota.

Kebijakan uji pasar secara teratur adalah untuk membandingkan harga dan kualitas barang/ jasa koperasi dengan barang/ jasa yang ditawarkan oleh badan usaha non-koperasi. Koperasi didesain untuk menghasilkan barang-jasa yang relatif lebih murah dari harga pasar, berdasarkan kualitas yang disepakati anggota. Kebijakan uji pasar ini perlu secara teratur direncanakan dan dilaksanakan mengingat bisa saja informasi pasar lebih dahulu sampai ke anggota.

Kebijakan uji partisipasi atau manfaat bagi anggota adalah mengkaji sejauh mana manfaat-manfaat koperasi baik yang langsung maupun manfaat tidak langsung sampai pada anggota. Dalam kenyataan belum tentu terjadi, karena banyak kendala baik yang berasal dari pengurus/ pengelola maupun dari pihak anggota. Salah satu indikator terjadinya distorsi manfaat adalah berkurangnya partisipasi anggota (dalam pembelian dan penjualan ke koperasi).

Kebijakan optimalisasi pelayanan didasarkan pada persyaratan yang diinginkan oleh kedua belah pihak (koperasi dan anggota). Pelaksanaan kebijakan optimalisasi pelayanan tersebut dapat dituangkan dalam rencana pelayanan yang disampaikan dalam setiap Rapat Anggota Tahunan dimana dibahas baik pelayanan tahunan yang lampau maupun rencana pelayanan yang akan datang.

Kebijakan-kebijakan koperasi di atas dapat diterapkan pada koperasi mandiri yang telah maju, dengan tingkat pendidikan dan pengalaman pengurus dan pengelola yang memadai (misalnya KPSBU dan KPBS di Kabupaten Bandung, KUD Cikajang di Kabupaten Garut), sementara bagi koperasi yang mulai berkembang baru mulai belajar dari koperasi maju, dengan melakukan promosi pengurus/ pengelola dan anggota melalui pendidikan dan pelatihan dengan instansi yang secara fungsional terkait ( IKOPIN, Dinas UKM dan Koperasi, Dinas Peternakan), juga penekanan pada “core business” yang diusahakan untuk diperkuat dan mencapai

usaha yang layak. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama (sekitar 5 tahun) dimana koperasi /KUD yang belum maju seperti KSU Tandangsari, KUD Bayongbong, KUD Cisurupan bersama-sama dengan anggotanya berusaha mencapai target populasi tertentu (skala pemilikan anggota minimal 4 ekor sapi laktasi, atau jumlah dengan anak sapi, sapi dara sekitar 7 ekor) dengan tingkat produksi susu minimal 12 liter per ekor per hari. Meskipun hal ini membutuhkan lahan yang cukup luas demi ketersediaan hijauan, namun koperasi perlu mengusahakannya.

Sudah saatnya koperasi melakukan uji partisipasi dengan mengkoreksi segala penyimpangan baik yang terjadi di tingkat pengurus, manajer maupun di tingkat anggota. Hal ini merupakan upaya penyembuhan dari “penyakit kronis” yang dihadapi koperasi sebagai perkumpulan orang (anggota) golongan ekonomi lemah dengan kualitas sumber daya yang relatif rendah (dilihat dari tingkat pendidikan dan social ekonominya). Sementara tingkat pendidikan pengurus relatif rendah dengan pola pikir yang masih tradisional.

### **3.3. Sistem Transformasi Pembangunan Peternakan Sapi Perah Melalui Kelembagaan Kelompok**

Transformasi pembangunan peternakan sapi perah melalui kelompok perlu dilakukan dengan pemberdayaan kelompok yang dimulai dengan pemberian pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan kepada ketua kelompok yang memiliki kriteria sebagai “key person” dan “opinion leader” yakni memiliki ciri : (1) mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan; (2) mampu melakukan percontohan yang perlu ditiru oleh anggotanya; (3) mampu menggerakkan anggota kelompoknya untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan kelompok; (4) mampu mendorong dan meningkatkan interaksi antar anggota kelompok agar terjalin keserasian pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota-anggotanya; (5) mampu menggerakkan kerja sama kelompok agar semua kegiatan yang dilaksanakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; dan (6) mampu menunjukkan potensi sumber daya yang tersedia dan mendorong segenap anggotanya agar tahu dan mampu melaksanakannya.

Model ketua kelompok seperti di atas agak sulit untuk didapatkan, akan tetapi melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan terhadap kontak peternak, diharapkan ketua kelompok tersebut dapat berperan sebagai “penyebarnya informasi” dan “agen perubahan” atau di KSU Tandang Sari dikenal dengan sebutan sebagai Penyuluh Swakarsa. Model ketua kelompok ini biasanya ber- pendidikan formal yang cukup (minimal setingkat SLTA) atau telah mengikuti kursus-kursus tani-ternak dengan senantiasa menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatnya dan senantiasa berpikir (“ngulik”) bagaimana cara meningkatkan produktivitas ternaknya.

Kelompok peternak merupakan kelas belajar, unit produksi usaha ternak, wahana kerja sama antar anggota dan antar kelompok dan dengan pihak lain, diantara anggota memiliki kesamaan dalam kepentingan, kondisi lingkungan (social, ekonomi, sumber daya), keakraban dan keserasian, yang dipimpin oleh seorang ketua. Dengan demikian maka upaya pembinaan kelompok peternak perlu disesuaikan dengan fungsi dan kemampuan kelompok.

Ada lima jurus atau tolak ukur kemampuan kelompok tani-ternak :

1. Kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usahatani Ternak para anggota dengan penerapan rekomendasi yang tepat dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.
2. Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain
3. Kemampuan pemupukan modal dan pemanfaatan pendapatan secara rasional
4. Kemampuan meningkatkan hubungan yang melembaga antara kelompok tani ternak dengan Koperasi/KUD.
5. Kemampuan menerapkan teknologi dan pemanfaatan informasi, serta kerjasama kelompok yang dicerminkan oleh tingkat produktivitas dari usahatani ternak para anggota.

Salah satu kelompok di KSU Tandang Sari bernama “Kelompok Mekar Jaya” telah memiliki tempat pertemuan yang sudah permanen, menerapkan simpanan anggota di kelompok yang dapat digunakan untuk simpan pinjam para anggota serta tunjangan hari tua peternak pada saat peternak sudah tidak kuat lagi berusaha ternak (sudah tua) meskipun jumlahnya tidak seberapa.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penyuluh yang ada di koperasi sekaligus KCD Peternakan tingkat kecamatan, memberikan pelatihan kepada ketua

kelompok setiap 3 bulan sekali, dan hasil pelatihan ini disebarluaskan oleh ketua kelompok kepada anggota dalam suatu pertemuan kelompok. Penyuluh baru datang ke kelompok, apabila diminta oleh kelompok tertentu. Hal ini dirasa kurang efektif dalam proses difusi inovasi, namun peternak anggota koperasi sendiri biasanya kurang responsitas terhadap penyuluhan, karena materi penyuluhan masih seputar “Sapta Usaha Ternak Sapi Perah” dan tentang “Perkoperasian”.

Untuk membina dan membimbing kelompok tani-ternak perlu dilakukan dengan berbagai system penyuluhan dan pembinaan kelompok, diantaranya dengan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) atau “Training and Visit System. “La” : Latihan PPL di BPP (2 minggu sekali); “Ku” : Kunjungan oleh Petugas Penyuluh ke wilayah Kelompok (2 minggu sekali) dan “Si” : Supervisi ke lapangan oleh Petugas Penyuluh dari tingkat lebih atas secara periodik.

Panca Usaha Bimbingan Kelompok peternak terdiri dari ;

1. Bimbingan Organisasi Kelompok peternak  
Usaha bimbingan ke arah penyempurnaan struktur organisasi kelompok, seksi-seksi, peraturan-peraturan kelompok.
2. Bimbingan rencana kegiatan kelompok peternak : usaha bimbingan terhadap penyusunan RDK, RDKK, rencana pertemuan, Kursus-kursus, kontak dengan PPL
3. Bimbingan Personal Kelompok peternak, meliputi usaha bimbingan tentang cara-cara berorganisasi, manajemen sederhana, kepemimpinan.
4. Bimbingan Sarana dan Peralatan Kelompok : usaha bimbingan terhadap pengadaan  
sarana dan peralatan milik kelompok, pemanfaatan, pemeliharaan dan penggunaannya.
5. Bimbingan kerja sama kelompok peternak, mendorong kerja sama :
  - a. Dalam kelompok dan antar kelompok
  - b. Kelompok dengan lembaga penyedia sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil (koperasi)
  - c. Kelompok dengan sumber-sumber modal
  - d. Kelompok dengan perusahaan swasta
  - e. Kelompok dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),



Di koperasi terdapat KOMDA (Komisaris Daerah) yang merupakan wakil dari koperasi tempat anggota mengambil konsentrat, menjual susu, meminta pelayanan IB dan kesehatan, penyampaian aspirasi dan saluran informasi dari koperasi. Pembentukan kelompok secara ideal, sama dengan pembentukan kelompok hamparan, dimana seharusnya ada beberapa orang kontak peternak yang membina peternak biasa, tetapi karena jumlah peternaknya tidak seragam pada setiap kelompok dan untuk kemudahan pembinaan dari koperasi/ KUD maka criteria ketua kelompok menjadi tidak ideal. Ada ketua kelompok di KPSBU Lembang yang membina 40 orang anggota, dan di KSU Tandang Sari yang membina sekitar 25 orang anggota, dimana keduanya memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya memotivasi anggota agar dapat berhasil seperti dirinya. Dengan demikian perlu juga dibentuk kontak peternak andalan yang dapat membina peternak biasa sehingga proses difusi inovasi sebagai bagian dari proses transformasi pembangunan peternakan dapat segera diwujudkan. Adapun pelaksanaan dari pemberdayaan kelompok perlu pula dikaji berdasarkan tipologi kelompok yakni : kelompok pemula dan kelompok lanjut masih perlu bimbingan yang intensif dari pihak penyuluh, sementara untuk kelompok madya dan utama, penyuluh lebih bersifat sebagai fasilitator.

Kelompok juga belajar, seperti halnya individu. Prestasi suatu kelompok tergantung pada kemampuan individu dan pada seberapa baiknya para anggota belajar bekerja sama lainnya. Menurut Gibson dkk. (1994), salah satu model pengembangan kelompok mengasumsikan bahwa kelompok berproses melalui empat tahap pengembangan yaitu ;

- (1) Dukungan Bersama; Pada tahap awal pembentukan kelompok, para anggota umumnya enggan berkomunikasi satu sama lainnya. Secara khasnya mereka tidak mau menyatakan pendapat, sikap, atau keyakinan. Kemungkinan terjadinya interaksi dan diskusi kelompok sangat sedikit, sampai anggota kelompok saling menerima dan mempercayai satu sama lain.
- (2) Komunikasi dan Pengambilan Keputusan ; Setelah kelompok mencapai tahap dukungan bersama, para anggota mulai berkomunikasi secara terbuka satu sama lain. Komunikasi ini menimbulkan peningkatan kepercayaan dan bahkan interaksi

- yang lebih banyak di dalam kelompok tersebut. Diskusi mulai memusatkan perhatian lebih khusus terhadap upaya-upaya pemecahan masalah, dan pengembangan strategi pilihan untuk menyelesaikan pemecahan masalah terbaik. Dalam hal ini terkait dengan keputusan kolektif untuk adopsi inovasi.
- (3) Motivasi dan Produktivitas; Inilah tahap pengembangan dimana usaha dikerahkan untuk mencapai tujuan kelompok. Kelompok bekerja sebagai unit yang bekerja sama bukan sebagai unit yang bersaing.
  - (4) Pengendalian dan Pengorganisasian. Pada tahap ini, afiliasi kelompok dinilai dan para anggota diatur oleh norma kelompok. Tujuan kelompok mendahului tujuan individu, dan norma kelompok dipatuhi atau sanksi diterapkan. Sanksi yang terakhir ialah pengasingan (pemboikotan) karena tidak mematuhi tujuan atau norma kelompok. Bentuk pengendalian lain adalah dengan pengucilan sementara. Norma kelompok penting sebagai control bagi anggota.

#### **3.4. Sistem Transformasi Melalui Upaya Peningkatan Partisipasi Peternak dan Proses Difusi Inovasi**

Peternak merupakan subyek dari pembangunan peternakan. Sebagai subyek sekaligus sasaran dari program pembangunan peternakan sapi perah ini, maka sudah sewajarnya partisipasi peternak baik dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan kelompok, maupun evaluasi kegiatan dan hasil perlu terlibat baik secara fisik, mental maupun dalam pemberian pemikiran yang konstruktif. Inovasi di bidang peternakan sapi perah yang secara garis besar tergolong pada "feeding" (pemberian pakan), "breeding" (pemilihan bibit dengan seleksi dan perkawinan) dan "management" yang meliputi manajemen pemeliharaan dan usaha atau "Sapta Usaha Ternak", akan mudah untuk diterima dan dilaksanakan (diadopsi), apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut (:1). Secara teknis memungkinkan untuk dilaksanakan; (.2). Secara social mudah diterima, tidak bertentangan dengan norma; (3). Secara ekonomis lebih menguntungkan dari yang terdahulu; (4). Secara ekologis tidak mengganggu kelestarian lingkungan; (5) Secara politis, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Proses keputusan inovasi pada umumnya meliputi : (1) Tahap sadar, : tahu ada ide baru tetapi kurang informasi; (2) Tahap minat : mulai menaruh minat dan

mulai mencari informasi lebih banyak; (3) Tahap penilaian : seorang peternak mengadakan penilaian terhadap ide baru (misal jenis pakan baru yang dianggap lebih berkualitas) dihubungkan dengan dirinya (kemampuan membeli, mengolah) baik pada saat ini maupun masa yang akan datang; (4) Tahap mencoba : mulai mencoba ide baru (pakan baru) dalam skala yang kecil, kemudian dievaluasi bagaimana hasilnya; (5) Tahap menerima bila benar-benar menguntungkan atau menolak (bisa menolak sementara maupun seterusnya) bila kurang menguntungkan atau tidak sesuai dengan kemampuan dirinya. Berdasarkan kategori pengadoption (yang menerima) inovasi, ada lima golongan pengadoption yaitu :

**(1) Innovator (golongan perintis);** merupakan golongan paling cermat dan yang pertama kali menerima inovasi. Dia memiliki nilai pribadi : sebagai petualang, berani tanggung resiko, dan disegani. Ciri pribadi : usia muda, status sosialnya tinggi, kaya materi, dan usaha ternaknya banyak. Perilaku berkomunikasi : berorientasi ke luar (lembaga ilmiah), impersonal, hubungan sosialnya : beberapa sebagai "opinion leader", kosmopolit, disegani, ber-, orientasi ke atas. Golongan ini tidak dekat dengan peternak biasa/anggota.

**(2) Early Adopter (Golongan Perintis),** golongan ini biasanya berumur antara 25-40 tahun, aktif dalam masyarakat, jumlahnya tidak banyak , tetapi lebih banyak dari golongan pertama. Nilai pribadi : orang yang dihormati karena memiliki sifat keakraban dan keramah-tamahan dengan tetangganya. Ciri pribadi pendidikannya lebih tinggi dari masyarakat lingkungannya, status sosialnya tinggi, memiliki factor produksi, usahatani-ternaknya luas dan khusus. Perilaku komunikasi : banyak berhubungan dengan penyuluh dan tokoh masyarakat lainnya. Hubungan sosialnya : sebagian besar sebagai "opinion leader" , kosmopolit dan lokalit, akrab dengan lainnya. Golongan inilah yang biasanya dijadikan sebagai ketua kelompok peternak yang tergabung dalam koperasi.

**(3) Early Majority (Golongan Penganut Dini),** golongan ini biasanya dalam mengadoption inovasi lebih lambat daripada golongan terdahulu, tetapi kalau sudah yakin terhadap inovasi baru mudah sekali terpengaruh. Biasanya usia lebih dari 40 tahun. Nilai pribadi : teliti, hati-hati, penuh pertimbangan, akrab

dengan sesame-nya. Ciri pribadi : pendidikan, status sosialnya dan luas usahanya pertengahan/ sedang. Perilaku berkomunikasi : banyak berhubungan dengan pelopor (early adopters) dan penganut lambat (late majority). Hubungan sosialnya : beberapa dapat menjadi “opinion leader” di kelasnya, sangat lokalit.

**(4) Late Majority (Golongan Penganut Lambat).** Golongan ini biasanya berusia sudah tua antara 45-55 tahun, dalam mengadopsi inovasi lebih lambat daripada golongan terdahulu, tetapi kalau sudah yakin dan melihat contoh-contoh keberhasilan maka mereka akan segera melaksanakannya. Nilai pribadi : skeptical, banyak pertimbangan, perlu desakan orang lain. Ciri pribadi : status social di bawah rata-rata, dan usaha taninya kecil. Perilaku berkomunikasi : sedikit berhubungan dengan penganut dini (early majority) dan kurang menggunakan mass media. Hubungan sosialnya : sangat sedikit opininya, sangat lokalit.

(5) Laggard (Golongan Kolot/ Tradisional/ Penolak). Golongan ini biasanya berusia sudah tua sekali (lebih dari 55 tahun), juga dinamakan golongan Non- adopter dan pendidikannya kurang. Nilai pribadi : tradisional, statis, konservatif, berorientasi ke masa lampau. Ciri pribadi ; status sosialnya rendah, usaha taninya sempit dan tidak khusus, (untuk peternak skala pemilikan ternak sedikit/ skala kecil). Perilaku komunikasi : senang dengan tetangganya dan keluarganya yang berpandangan sama. Hubungan sosialnya : sangat kecil kepemimpinannya, terisolasi dan mengisolasi diri, sangat lokalit. Bila golongan ini mampu dipengaruhi dan dapat menerima inovasi maka proses difusi inovasi di kalangan peternak dapat berjalan dengan baik

Berdasarkan kategori pengadoptioner dan karakteristik peternak maka golongan early adopter bersama-sama dengan penyuluh dengan menggunakan media elektronik radio, televisi dan komunikasi interpersonal serta membentuk “forum media” (semacam kelompok pencampur), proses difusi (penyebaran inovasi) diharapkan dapat berjalan dengan baik.

## IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

1. Sistem transformasi pembangunan peternakan sapi perah melalui kelembagaan koperasi dapat dilakukan melalui perbaikan dan peningkatan dalam “core business” usaha ternak sapi perah yang layak, menerapkan sistem promosi (pendidikan bagi pengurus, manajer dan anggota, penerapan kaidah-kaidah penghematan (efisiensi) dan optimalisasi pelayanan koperasi terhadap anggota. Sementara pengembangan kelompok dapat dilakukan melalui Panca Usaha Bimbingan Kelompok dan pemberian pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan terhadap ketua kelompok dengan senantiasa dibimbing oleh seorang penyuluh.
2. Model pengembangan kelembagaan usaha ternak sapi perah melalui koperasi dimaksudkan agar tercapai optimalisasi pelayanan koperasi terhadap anggota dengan menjalin kerjasama dan fungsionalisasi diantara petugas yang tergabung dalam Unit Pelaksana Teknis Usaha Sapi Perah serta kerja sama/ kemitraan dengan lembaga lain (pemerintah dan pemodal/ lembaga keuangan) yang dapat meningkatkan kelayakan usaha peternak maupun koperasi.
3. Sistem transformasi pembangunan peternakan sapi perah dapat dilakukan dengan memanfaatkan dan mengaktifkan golongan early adopter yang dekat dengan golongan pengadoptioner lain (peternak anggota), dan bertindak sebagai ketua kelompok yang bersama-sama dengan petugas penyuluh peternakan menyebarkan inovasi “Sapta Usaha Ternak “ sapi perah sehingga proses difusi berjalan lancar.

#### 4.2. Saran

1. Sistem transformasi pembangunan peternakan sapi perah dari tradisional ke modern, memerlukan keterlibatan berbagai pihak, baik partisipasi peternak sapi perah itu sendiri maupun penyuluh dari Dinas Peternakan, pengurus koperasi maupun Industri Pengolahan Susu agar peternak menyadari tugas dan fungsi

perannya sebagai produsen susu yang harus memperhatikan persyaratan “ASUH” singkatan dari Aman, Sehat, Utuh dan Halal.

2. Dalam upaya menjamin konsistensi perilaku peternak, strategi yang dapat dilakukan adalah : (a) membuat pengawasan yang cukup ketat sampai mereka sadar akan kewajibannya, kemudian tanamkan kesadaran pada diri mereka agar mereka senantiasa jujur dan disiplin dalam bekerja; (b) Usahakan ada insentif bagi para peternak yang dapat menjaga kualitas susu melalui pembelian harga susu yang secara riil menguntungkan peternak namun masih memberi keuntungan pada koperasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Aksi Agraris Kanisius, 1990, Beternak Sapi Perah, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
2. Dasuki, M. A., 1983, Perspektif Perkembangan Peternakan Sapi Perah Sebagai Landasan Kesepadanan Mengisi Kebutuhan Susu di Jawa Barat, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
3. Dudung Abdul Adjid, 1985, Pola Partisipasi Masyarakat pedesaan Dalam Pembangunan Pertanian Berencana, Disertasi Pasca sarjana UNPAD, Bandung.
3. Gibson, J.L., J.M. Ivancevich, dan Donnely, JH, 1982, Organisasi dan Manajemen, Alih Bahasa Djoerban Wahid, 1990, Erlangga, Jakarta.
4. Hayami, Y. and Kikuchi, M., 1981, Assian Village Economic At The Cross Road : An Economics Approach to institutional change, University of Tokyo Press.
5. Hanel, Alfred, 1987, Pemikiran-Pemikiran Dasar Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan-Kebijakan Bagi Pengembangannya di Negara-Negara Berkembang, KKBM IKPIN, Bandung.
6. Herman Soewardi, 1985, Menuju Ke Arah Pola Pembangunan yang Ideal dalam Koperasi Ke Arah Bangun Perusahaan Koperasi, Balitbang. Departemen Koperasi, Jakarta.
7. Inkeles, Alex, 1984, Modernisasi Manusia, dalam buku Modernisasi Dinamika Pertumbuhan, Myron Weiner (editor), Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
8. Koentjaraningrat, 1993, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta.
9. Loekman Soetrisno, 2002, Paradigma Baru Pembangunan Pertanian, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
10. Mc Clelland, D.C., 1961, The achieving Society, The Free Press, New York, Alih Bahasa Oleh Siswo Suyanto, 1987, Memacu Masyarakat Berprestasi, Mempercepat Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Motif Berprestasi, Inter Media, Jakarta.
11. Mosher, A T, 1969, Menciptakan struktur Pedesaan Progresif, Penerbit Yasaguna, Jakarta.
12. Munandar, M.S., 1982, Hubungan Motivasi Berprestasi "Achievement Motivation" Peternak Domba dengan Faktor Produksi dan Kegiatan Penyuluhan, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Bandung.

13. Noer soetrisno, 2002, Wajah Koperasi Tani dan Nelayan Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Kritis, Artikel - Th II No 5, Agustus 2003.
12. Rogers Everet, M, dan Shoemaker, F Floyed, 1987, Memasyarakatkan Ide- Ide Baru, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.
13. Sastropoetro, R.A., 1988, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional, Alumni, Bandung.
14. Sinaulan, J., H., 1992, Faktor-Faktor yang Berpengaruh Pada Partisipasi Petani terhadap Kredit Usaha Tani, Disertasi Program Pascasarjana UNPAD, Bandung.
15. Soekartawi, 1988, Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian, UI Press, Jakarta.
16. Taliziduhu Ndaraha, 1990, Pembangunan Masyarakat ; Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Penerbit Rineka Cipta, Bandung.
17. Vanden Ban, A., W., dan Hawkins, H.,S., 1999. Penyuluhan Pertanian, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.



## DAFTAR ISI

BAB

Halaman

	KATA PENGANTAR .....	i
	DAFTAR ISI .....	ii
I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
	1.2. Identifikasi Masalah .....	4
	1.3. Tujuan .....	5
	1.4. Manfaat .....	5
II	SISTEM PETERNAKAN SAPI PERAH TRADISIONAL DITINJAU DARI DIMENSI TEKNIS EKONOMIS DAN SOSIO KULTURAL..	6
	2.1 Sistem Peternakan Tradisional Ditinjau Dari Dimensi Teknis- Ekonomis.....	6
	2.2 Sistem Peternakan Tradisional Ditinjau Dari Dimensi Sosio Kultural.....	11
III	SISTEM TRANSPORMASI PENGEMBANGAN PETERNAKAN SAPI PERAH.....	14
	3.1. Pengembangan struktur Kelembagaan Usaha Ternak Sapi Perah .....	14
	3.2. Peranan Penyuluhan dalam Pembangunan Peternakan Sapi Perah .....	17
	3.3. Upaya Menggerakkan Partisipasi Peternak .....	19
	3.4. Faktor Pembatas Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah .....	22
IV	SISTEM PETERNAKAN MODERN DITINJAU DARI DIMENSI TEKNIS-EKONOMI DAN SOSIO-KULTURAL .....	23
	4.1. Sistem Peternakan Modern Ditinjau dar Dimensi Teknis-Ekonomi .....	23
	4.2. Sistem Peternakan Modern Ditinjau dari Dimensi Sosio-Kultural .....	26
V	KESIMPULAN .....	31
	5.1. Kesimpulan .....	29

5.2. Saran .....	29
DAFTAR PUSTAKA .....	32